KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Gelar Konferensi Nasional Ke-2 : MPR Dorong Etika Berbangsa Diatur Dalam Undan-Undang
Tanggal : Kamis, 12 November 2020
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Gelar Konferensi Nasional Ke-2

MPR Dorong Etika Berbangsa Diatur Dalam Undang-Undang

Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa yang digelar di Gedung MPR Jakarta, kemarin, berjalan sukses dan lancar. MPR berharap, hasil dari konferensi ini menjadi masukan kepada pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan RUU Etika Penyelenggara Negara.

KONFERENSI dihadiri sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara. Mereka adalah Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, Ketua DKPP Muhammad, dan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Tuan rumah Ketua MPR Bambang Soesatyo hadir didampingi Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid. Sementara Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid, dan Lestari Moerdijat mengikuti acara secara virtual bersama ratusan peserta penyelenggara pemilu di daerah.

Acara dimulai dengan sambutan dari Bambang Soesatyo yang juga menjadi pembicara kunci. Setelah itu dilanjutkan konferensi yang menghadirkan 4 narasumber. Keempatnya orang-orang top. Yakni, pimpinan KY Prof. Aidul Fitriciada Azhari, anggota DPD yang juga pakar hukum tata negara Prof Jimly Asshiddiqie, dan mantan Menkumham Andi Mattalatta. Acara dimoderatori pakar hukum Universitas Indonesia Fitra Arsil.

Dalam sambutannya, Bambang Soesatyo mengatakan, etika kehidupan berbangsa merupakan pondasi bagi keberlangsungan hidup suatu bangsa. Runtuhnya etika berbangsa akan meruntuhkan bangsa itu sendiri.

Bambang bilang, Indonesia sebenarnya punya payung hukum dan aturan soal etika kehidupan berbangsa. Yaitu Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001. Sayangnya, banyak yang tak menyadari keberadaan Tap MPR tersebut. "Padahal Tap MPR itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh penyelenggara negara dan juga masyarakat," kata Bamsoet, sapaan Bambang.

Bambang menjelaskan, Tap MPR itu lahir dari keprihatinan serta ancaman serius terhadap bangsa. Selain itu terjadi kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Diharapkan, hasil Konferensi ini akan menjadi rekomendasi untuk pemerintah dan DPR, agar setiap pejabat maupun elite politik dapat bersikap jujur, amanah, berjiwa besar, dan melayani.

"Kemudian memiliki keteladanan, rendah hati dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan, dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum, maupun rasa keadilan masyarakat," papar Bamsoet.

Kepada wartawan, Bamsoet menjelaskan, turunan dari Tap MPR ini sudah lahir RUU Etika Penyelenggara Negara. RUU tersebut pernah masuk prolegnas periode 2014-2019. Namun sampai sekarang, UU tersebut tidak bisa terwujud. "Kemudian ada pemikiran dari MPR untuk mendorong kembali RUU itu di periode 2019-2024. Karena ini adalah utang, maka kami dorong kembali," ujarnya.

Bamsoet menjelaskan, saat ini hampir semua lembaga termasuk DPR punya lembaga etik. Ia berharap dengan adanya undang-undang tersebut, ada sinergi dari penegak lembaga etik. "Kita sinergikan sehingga ada pengaturan lebih jelas bagaimana seharusnya (sikap) seorang penyelenggara negara," ungkapnya.

Jazilul Pawaid menambahkan, terbitnya Tap MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa didasari semangat reformasi untuk memerangi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Karena itu, agar Tap MPR ini bisa operasional, butuh diterjemahkan dalam sebuah Undang-Undang. "Agar semangat reformasi bisa kita rasakan denyutnya sampai hari ini dan berhasil. Karena itu cita-cita besar," ujarnya.

Ketua KY Jaja Ahmad Jayus mengatakan, penggodokan RUU ini jadi momentum yang sangat penting agar setiap penyelenggara negara mau pun masyarakat memahami betul tentang etika berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, masyarakat Indonesia bisa jadi lebih baik. "Baik dari sisi akhlak, kalau dalam bahasa agama, atau pun dalam perilaku sehari-harinya," kata.

Khusus untuk etika penegak hukum, Jaja meminta semua hakim harus patuh terhadap peraturan ini. Sebab, hal itu cerminan dari hakim yang beretika. "Kalau seandainya hakim itu semua beretika maka penegakan hukum yang berkeadilan itu akan terwujud," pungkasnya. ■ BCG